



Penyelarasan Rencana Biaya dengan Sumber Pendanaan Organisasi Pendidikan Islam

Tanto Prima^{1*}, Ummi Mardiyah²

^{1,2}Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: primatanto1@gmail.com¹, ummi.mardiyah@uinsa.ac.id²

*Korespondensi penulis: primatanto1@gmail.com

Abstract. *The alignment of budget planning with funding sources is a crucial aspect of financial management in Islamic educational organizations to ensure operational sustainability and improve the quality of educational services. This study aims to analyze strategies that can be implemented in drafting and adjusting budget plans with various funding sources, such as government funds, zakat, infaq, waqf, community donations, and student contributions. This research employs the library research method, which involves collecting and analyzing various literature related to Islamic educational financial management. The results indicate that the principles of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability must be applied in managing educational funds to ensure optimal budget utilization. One of the key indicators for maintaining financial balance is the budget balance ratio, which measures the extent to which an organization's revenue can cover its expenditures. If the ratio reaches or exceeds 100%, it indicates a surplus that can be allocated for institutional development. However, if the ratio is below 100%, a deficit occurs that must be addressed immediately through cost efficiency strategies, diversification of funding sources, and optimization of productive waqf assets. This study emphasizes that a systematic and sustainable financial strategy is essential for maintaining the financial stability of Islamic educational organizations. By implementing well-structured budget planning, strict supervision, and diversified funding sources, organizations can ensure financial sustainability and enhance the overall quality of Islamic education.*

Keywords: *Balance Rasio, Budget Alignment, Financial Management.*

Abstrak. Penyelarasan rencana biaya dengan sumber pendanaan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan organisasi pendidikan Islam guna memastikan keberlanjutan operasional dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dapat diterapkan dalam menyusun dan menyesuaikan rencana anggaran dengan berbagai sumber pendanaan, seperti dana pemerintah, zakat, infaq, wakaf, donasi masyarakat, serta kontribusi peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode library research, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur terkait pengelolaan keuangan pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas harus diterapkan dalam pengelolaan dana pendidikan agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu indikator utama dalam memastikan keseimbangan keuangan adalah rasio keseimbangan anggaran yang mengukur sejauh mana pendapatan organisasi mampu menutupi pengeluaran. Jika rasio mencapai atau melebihi 100%, berarti organisasi memiliki surplus yang dapat dialokasikan untuk pengembangan institusi. Namun, jika rasio di bawah 100%, maka terjadi defisit yang harus segera ditangani melalui strategi efisiensi biaya, diversifikasi sumber pendanaan, serta optimalisasi aset produktif berbasis wakaf. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi keuangan yang sistematis dan berkelanjutan sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan organisasi pendidikan Islam. Dengan menerapkan perencanaan anggaran yang matang, pengawasan ketat, serta diversifikasi sumber dana, organisasi dapat memastikan keberlanjutan finansial dan meningkatkan mutu pendidikan Islam secara keseluruhan.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan, Penyelarasan Anggaran, Rasio Keseimbangan.

1. PENDAHULUAN

Masalah keuangan merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan, termasuk dalam keberlangsungan suatu lembaga pendidikan. Keuangan menjadi faktor krusial yang memengaruhi berbagai aspek dalam operasional lembaga pendidikan, mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana, pembayaran tenaga pendidik dan kependidikan, hingga pengembangan program akademik dan non-akademik. Tanpa adanya perencanaan keuangan yang baik, lembaga pendidikan dapat mengalami kendala dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang efektif sangat diperlukan guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan mutu pendidikan. Menurut Muhtar agar pengelolaan sekolah dan organisasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkualitas, maka instrumen penting yang harus dilakukan adalah suatu perencanaan. (Muhtar et al., 2021, p. 525) Perencanaan keuangan dalam lembaga pendidikan harus dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sumber pendanaan, alokasi anggaran, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, perencanaan keuangan juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaannya. Dengan adanya perencanaan keuangan yang baik, lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami dalam mengelola perencanaan keuangan pendidikan Islam. Keberagaman sumber pendanaan ini harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi keberlanjutan pendidikan. Penyusunan anggaran yang tepat dan berorientasi pada kebutuhan serta prioritas lembaga. Penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang, serta memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan visi serta misi lembaga. Anggaran harus mencakup berbagai aspek, seperti penggajian tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, pemeliharaan fasilitas, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, alokasi anggaran juga harus memperhatikan aspek sosial dan keagamaan, seperti dana untuk program beasiswa bagi siswa kurang mampu serta pengembangan kegiatan dakwah dan keislaman. Penerapan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat penting agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, donatur, dan pemerintah, memiliki kepercayaan terhadap lembaga pendidikan. Salah satu cara untuk mencapai transparansi adalah dengan melakukan pencatatan keuangan yang jelas dan sistematis, serta menyusun laporan keuangan secara berkala. Selain itu, audit keuangan juga

perlu dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan dana dan bahwa setiap pengeluaran telah sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.(Arifudin et al., 2021, p. 158)

Evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana. Evaluasi menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pengawasan dapat dilakukan melalui pembentukan tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan adanya evaluasi yang rutin, lembaga pendidikan Islam dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan mereka. Secara keseluruhan, perencanaan keuangan yang baik akan membantu lembaga pendidikan Islam dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan memahami aspek-aspek penting dalam pengelolaan keuangan, lembaga pendidikan Islam dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan daya saingnya di tengah perkembangan zaman.

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pendidikan Islam terus berkembang dalam berbagai bentuk, seperti pesantren, madrasah, sekolah Islam terpadu, hingga perguruan tinggi Islam. Dalam perkembangannya, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi pendidikan Islam adalah bagaimana menyelaraskan rencana biaya dengan sumber pendanaan yang tersedia. Keberhasilan lembaga pendidikan dalam mengelola keuangan akan sangat menentukan keberlanjutan serta kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik.

Dalam konteks organisasi pendidikan Islam, rencana biaya mencakup berbagai aspek, mulai dari operasional sehari-hari, penggajian tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, hingga program-program akademik dan non-akademik. Sementara itu, sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan berasal dari berbagai elemen, seperti dana pemerintah, zakat, infaq, wakaf, donasi masyarakat, serta kontribusi dari peserta didik. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana mengelola dan menyelaraskan antara anggaran yang direncanakan dengan sumber dana yang tersedia agar lembaga dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Sering kali, organisasi pendidikan Islam menghadapi kendala dalam hal ketidakseimbangan antara kebutuhan biaya dan ketersediaan dana. Beberapa lembaga pendidikan mungkin mengalami keterbatasan dana operasional yang menghambat pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Sebaliknya, ada juga yang

memperoleh dana dalam jumlah besar tetapi tidak memiliki perencanaan yang baik dalam penggunaannya sehingga terjadi inefisiensi. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi dan pendekatan yang sistematis dalam menyusun serta menelaraskan rencana biaya dengan sumber pendanaan yang ada.

Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Lampung dan STIT At-Taqwa Gegerkalong Bandung, telah tersedia Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam mengelola keuangan agar berjalan lancar. Buku pedoman yang digunakan di STIT Al-Hikmah Lampung telah mencakup aspek pengorganisasian dan koordinasi antar petugas, termasuk pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, pedoman ini juga telah mengatur langkah-langkah serta prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset lembaga secara sistematis, sehingga memberikan arah yang jelas, mudah dipahami, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. (Kartika et al., 2023, p. 152)

Namun demikian, pedoman tersebut masih memiliki kekurangan, terutama dalam hal pencantuman prinsip-prinsip kebijakan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Fokus utama dari pedoman ini lebih menitikberatkan pada aspek akuntansi dan pengelolaan aset, tetapi belum sepenuhnya membahas kebijakan keuangan secara menyeluruh, termasuk perencanaan, pengawasan, serta evaluasi. Terlebih lagi, belum terdapat langkah-langkah perencanaan yang rinci sebagai panduan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di tingkat sekolah tinggi. Ketiadaan pedoman perencanaan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan operasional di lapangan, terutama dalam menangani kegiatan yang lebih prioritas. Selain itu, dalam aspek pengawasan dan evaluasi, pedoman ini belum menyediakan panduan teknis terkait pengawasan internal maupun eksternal yang dapat dijadikan acuan dalam implementasi di lembaga.

Sementara itu, Pedoman Pengelolaan Keuangan STIT At-Taqwa Bandung lebih banyak berisi ketentuan serta kebijakan terkait pengelolaan keuangan lembaga. Prinsip-prinsip keuangan seperti keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas telah dicantumkan dalam pedoman ini. Namun, acuan tersebut masih bersifat umum dan belum cukup rinci, sehingga diperlukan pedoman tambahan yang lebih spesifik. Dari sisi fungsi pengelolaan keuangan, pedoman ini telah mencakup aspek perencanaan yang menelaraskan strategi, kegiatan, serta operasional dengan pengelolaan keuangan secara lebih sistematis.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan, khususnya terkait struktur organisasi dan koordinasi, pedoman STIT At-Taqwa belum mencantumkan secara jelas pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing pelaksana. Hal ini berpotensi menimbulkan

tumpang tindih tugas, ketidakjelasan dalam koordinasi, serta kemungkinan terjadi benturan antar bagian yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, dari segi pengawasan dan evaluasi, pedoman ini sudah mencakup mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal. Secara keseluruhan, pedoman pengelolaan keuangan di STIT At-Taqwa lebih terstruktur dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, tetapi masih membutuhkan ketentuan lebih rinci mengenai mekanisme serta prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan di tingkat perguruan tinggi. Sedangkan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian kali ini adalah bagaimana menyelaraskan rencana biaya dengan sumber dana yang ada. Penelitian ini akan mencari rumus perhitungan rencana biaya dengan sumber pendanaan pada organisasi pendidikan Islam dan diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan system pembiayaan pada organisasi pendidikan Islam terutama untuk mengetahui apa strategi yang akan digunakan setelah mengetahui rasio keseimbangan antara rencana biaya dan sumber pendanaan pada organisasi serta diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya penyelarasan rencana biaya dan sumber pendanaan pada organisasi pendidikan Islam.

2. KAJIAN TEORI

Dalam kajian ini, terdapat beberapa teori dan konsep yang relevan dalam memahami penyelarasan rencana biaya dengan sumber pendanaan dalam organisasi pendidikan Islam. Beberapa teori yang akan dijadikan sebagai landasan penelitian ini meliputi: (1) Teori Manajemen Keuangan, teori ini menjelaskan bagaimana suatu organisasi mengelola sumber daya keuangan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan Islam, manajemen keuangan yang baik akan memastikan keberlanjutan operasional serta peningkatan kualitas pendidikan yang diberikan. (2) Teori Sumber Daya Keuangan, teori ini menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendanaan untuk menjamin stabilitas keuangan suatu organisasi. Dalam pendidikan Islam, sumber dana dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga filantropi Islam seperti zakat dan wakaf. (3) Teori Efisiensi dan Efektivitas, efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang minimal untuk mencapai hasil maksimal, sedangkan efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam konteks penyelarasan rencana biaya, teori ini menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat agar tidak terjadi pemborosan atau kekurangan dana yang menghambat operasional Lembaga. (4) Teori Good Governance dalam Keuangan Pendidikan, prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Organisasi pendidikan Islam perlu menerapkan

prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan dana agar tercipta kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen terkait lainnya. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penyelarasan rencana biaya dengan sumber pendanaan dalam organisasi pendidikan Islam. Pendekatan ini sangat relevan karena permasalahan pembiayaan pendidikan di era digital semakin kompleks. Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, keterbatasan sumber daya, dan perlunya kolaborasi antar lembaga menuntut solusi yang inovatif dan adaptif. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses terhadap teknologi dan keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama. Melalui studi pustaka, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai model dan strategi pembiayaan dari berbagai konteks, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan pemahaman yang lebih luas, peneliti dapat menyusun kerangka konseptual yang tidak hanya aplikatif tetapi juga solutif sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan strategi pembiayaan yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan efisien. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat lebih siap menghadapi tantangan finansial di era digital serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Pendanaan

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu proses sistematis dalam mengelola sumber daya finansial guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang optimal. Proses ini meliputi perencanaan, pengalokasian, distribusi, serta pengawasan dana agar dapat digunakan secara efisien dan efektif. Dalam penerapannya, manajemen pembiayaan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumber dana yang tersedia dapat digunakan secara transparan dan bertanggung jawab guna mendukung fasilitas, sarana, dan kegiatan pembelajaran. Salah satu aspek penting dalam manajemen pembiayaan pendidikan adalah perencanaan keuangan yang melibatkan identifikasi kebutuhan, estimasi biaya, serta strategi pendanaan yang akan diterapkan. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pendidikan mendapatkan alokasi dana yang sesuai dengan prioritas utama. Selain itu, pembiayaan

pendidikan juga bergantung pada berbagai sumber dana, seperti bantuan dari pemerintah, sumbangan masyarakat, dana yayasan, serta pendapatan dari usaha sekolah atau institusi pendidikan.

Pengalokasian dan distribusi dana harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel agar penggunaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Alokasi anggaran biasanya mencakup berbagai aspek utama seperti gaji tenaga pendidik, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum, serta penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam hal ini, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dapat memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dalam implementasinya, manajemen pembiayaan pendidikan berpegang pada beberapa prinsip utama, di antaranya adalah efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Efisiensi dalam penggunaan dana berarti bahwa setiap alokasi anggaran harus dapat memberikan manfaat maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Efektivitas mengacu pada dampak nyata dari penggunaan dana terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Sementara itu, keberlanjutan menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang agar pendanaan pendidikan dapat terus berjalan dengan stabil.

Untuk mengoptimalkan manajemen pembiayaan pendidikan, beberapa strategi dapat diterapkan. Salah satunya adalah diversifikasi sumber pendanaan, yakni dengan tidak hanya mengandalkan satu sumber dana, tetapi juga mencari alternatif lain seperti hibah, dana CSR perusahaan, serta kerja sama dengan sektor swasta. Selain itu, meningkatkan efisiensi anggaran dengan mengurangi pemborosan dan mengalokasikan dana secara prioritas juga menjadi langkah penting dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Penggunaan teknologi dalam manajemen keuangan, seperti sistem digitalisasi keuangan, dapat membantu meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pencatatan serta pengelolaan dana. Pengawasan yang ketat melalui audit keuangan juga diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana pendidikan. Dengan penerapan teori dan prinsip manajemen pembiayaan pendidikan yang baik, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa setiap dana yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif. Perencanaan yang matang, pengelolaan yang profesional, serta sistem pengawasan yang kuat menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dalam konteks pendanaan organisasi pendidikan Islam, sumber dana dapat diperoleh dari dua kategori utama, yaitu dari dalam organisasi itu sendiri (internal) dan dari pihak luar (eksternal). Sumber-sumber dana eksternal mencakup beberapa aspek berikut: (Kartika et al., 2023) (1) Pemerintah dan Masyarakat, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1, pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, Pasal 49 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan dana dalam bentuk hibah kepada satuan pendidikan. Dengan demikian, pemerintah menjadi sumber pendanaan utama, yang kemudian diperkuat oleh kontribusi masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan, baik melalui bantuan keuangan maupun penciptaan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran. (2) Wakaf, merupakan sumbangan yang diberikan khusus untuk keperluan agama. Dana yang bersumber dari wakaf digunakan untuk mendukung aktivitas keagamaan dan kesejahteraan umat Islam. (3) Zakat, lembaga amil zakat di Indonesia memiliki peran besar dalam mendanai berbagai institusi pendidikan. Zakat dapat dialokasikan sesuai ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu untuk fakir miskin, pengelola zakat, mualaf, pembebasan budak, orang-orang yang berutang, perjuangan di jalan Allah, dan para musafir yang membutuhkan bantuan. (4) Shodaqoh, sumbangan berupa sedekah di jalan Allah dijanjikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, sedekah juga menjadi salah satu sumber dana yang dapat membantu pembiayaan pendidikan Islam. (5) Hibah, merupakan pemberian harta secara sukarela selama seseorang masih hidup, atas dasar kasih sayang, yang diperuntukkan bagi individu, organisasi sosial, keagamaan, atau akademik. Karena sifatnya yang tidak mengikat, hibah menjadi salah satu bentuk pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan Islam. (6) Sumber Dana Lain yang Tidak Mengikat, lembaga pendidikan Islam juga dapat memperoleh dana dari berbagai sumber lain, baik internal maupun eksternal. Sumber dana internal dapat berasal dari pembentukan badan usaha atau kegiatan wirausaha, pendirian lembaga amil zakat, serta promosi dan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan finansial. Sementara itu, sumber eksternal dapat berasal dari donatur tetap atau bantuan dari luar negeri. Ahmad Tafsir bahkan berharap bahwa sumber dana pendidikan Islam ke depan dapat diperoleh melalui pemanfaatan berbagai aset yang dimiliki.

Kebutuhan Anggaran

Organisasi pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu, dan perguruan tinggi Islam, memiliki kebutuhan anggaran yang kompleks dan harus direncanakan dengan baik agar kegiatan pendidikan dapat berjalan secara optimal. Kebutuhan anggaran dalam organisasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari operasional pendidikan, fasilitas dan infrastruktur, program beasiswa, kegiatan ekstrakurikuler, teknologi, hingga pengelolaan dana cadangan untuk keberlanjutan institusi. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif, organisasi pendidikan Islam dapat terus berkembang, memberikan manfaat kepada peserta didik, serta berkontribusi terhadap kemajuan umat Islam secara keseluruhan.

Salah satu komponen utama dalam kebutuhan anggaran adalah operasional pendidikan. Anggaran ini mencakup pembayaran honorarium bagi tenaga pendidik dan staf administrasi, yang merupakan bagian krusial dalam menjaga kualitas pendidikan. Gaji guru, dosen, serta tenaga kependidikan lainnya harus disesuaikan dengan standar yang layak agar mereka tetap termotivasi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, organisasi juga memerlukan anggaran untuk pengadaan buku, bahan ajar, dan modul pembelajaran yang berkualitas. Dalam lingkungan pendidikan Islam, kurikulum sering kali menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga biaya untuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, serta penyusunan materi ajar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan anggaran.

Selain aspek operasional, fasilitas dan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran. Gedung sekolah, masjid, asrama santri, laboratorium, perpustakaan, dan aula serbaguna adalah beberapa infrastruktur yang harus dikelola dengan baik agar dapat menunjang proses pembelajaran. Anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan dan renovasi bangunan sangat penting agar fasilitas tetap layak digunakan dalam jangka panjang. Jika lembaga pendidikan ingin berkembang dan meningkatkan kapasitasnya, maka pembangunan ruang kelas baru, laboratorium komputer, dan fasilitas olahraga juga perlu dimasukkan dalam rencana anggaran. Selain itu, pengadaan alat-alat pendidikan seperti papan tulis digital, proyektor, komputer, serta peralatan laboratorium juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Kebutuhan anggaran juga mencakup program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa akses pendidikan Islam dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala oleh keterbatasan finansial. Dana beasiswa dapat dialokasikan untuk pembebasan atau subsidi biaya pendidikan, bantuan uang saku bagi santri yatim dan dhuafa, serta dukungan untuk pengadaan buku dan perlengkapan belajar. Beasiswa ini biasanya

bersumber dari zakat, infaq, sedekah, atau dana hibah yang diperoleh dari donatur maupun lembaga filantropi Islam. Oleh karena itu, organisasi pendidikan Islam harus memiliki mekanisme yang transparan dalam pengelolaan dan penyaluran dana beasiswa agar dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan karakter peserta didik juga membutuhkan anggaran tersendiri. Organisasi pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan keterampilan siswa. Kegiatan seperti program tahfidz Al-Qur'an, lomba-lomba Islami (misalnya Musabaqah Tilawatil Qur'an, lomba pidato Islami, atau kompetisi kaligrafi), serta pelatihan kepemimpinan Islami merupakan bagian dari upaya mencetak generasi muslim yang unggul. Selain itu, kegiatan studi banding ke lembaga pendidikan Islam lain, kunjungan ke tempat-tempat bersejarah dalam Islam, serta kegiatan sosial seperti bakti sosial dan program pengabdian masyarakat juga perlu mendapatkan alokasi anggaran.

Seiring dengan perkembangan teknologi, digitalisasi pendidikan juga menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan anggaran. Pengadaan perangkat IT, seperti komputer, server, jaringan internet, serta perangkat lunak untuk pembelajaran daring menjadi kebutuhan yang semakin penting, terutama dalam era digital saat ini. Banyak organisasi pendidikan Islam yang mulai mengembangkan sistem e-learning atau pembelajaran berbasis digital agar peserta didik dapat belajar secara lebih fleksibel dan efektif. Selain itu, pengelolaan administrasi sekolah juga semakin banyak yang berbasis digital, sehingga investasi dalam sistem manajemen sekolah berbasis teknologi, seperti aplikasi keuangan, database siswa, serta platform komunikasi antara guru dan orang tua, juga menjadi kebutuhan anggaran yang perlu dipertimbangkan.

Tidak hanya itu, organisasi pendidikan Islam juga perlu memiliki dana cadangan dan strategi keberlanjutan keuangan agar tidak selalu bergantung pada donasi atau pendanaan eksternal. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengelola dana wakaf produktif, di mana dana yang dihimpun dari wakaf dapat digunakan untuk investasi yang memberikan keuntungan jangka panjang bagi institusi. Contohnya adalah pendirian usaha berbasis syariah, pengelolaan aset produktif seperti properti atau tanah wakaf, serta investasi dalam bisnis halal yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi lembaga pendidikan. Dana cadangan ini sangat penting untuk menghadapi keadaan darurat, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau kebutuhan mendesak lainnya yang bisa menghambat operasional lembaga pendidikan. (Arifah, 2018, p. 29)

Dengan perencanaan anggaran yang matang dan pengelolaan yang transparan, organisasi pendidikan Islam dapat memastikan bahwa seluruh kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi dengan baik. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga penting untuk membangun kepercayaan dari donatur, wali murid, serta masyarakat luas yang mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan Islam. Selain itu, evaluasi berkala terhadap anggaran dan efektivitas penggunaannya harus dilakukan secara rutin agar dapat dilakukan perbaikan dan optimalisasi dalam pengelolaan keuangan lembaga.

Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran dalam organisasi pendidikan Islam sangat luas dan mencakup berbagai aspek, mulai dari operasional, fasilitas, beasiswa, ekstrakurikuler, teknologi, hingga strategi keberlanjutan. Dengan adanya alokasi anggaran yang jelas dan sistem pengelolaan yang baik, organisasi pendidikan Islam dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat, serta mencetak generasi muslim yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Hal ini sesuai dengan pendapat (Brigham dan Houston, 2019) yang menyatakan bahwa manajemen sumber daya keuangan bertujuan untuk memaksimalkan nilai organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki. Pernyataan ini menekankan pentingnya strategi yang efektif dalam mengelola keuangan agar organisasi dapat mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjangnya.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana

Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana menjadi aspek penting dalam penyelarasan rencana anggaran dengan sumber pendanaan organisasi Islam. Organisasi Islam, terutama di bidang pendidikan, memiliki berbagai sumber pendanaan seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, serta hasil usaha berbasis syariah. Agar penggunaan dana berjalan optimal, organisasi harus memastikan bahwa setiap anggaran yang disusun selaras dengan karakteristik sumber pendanaan yang diterima. Misalnya, dana zakat harus dialokasikan untuk kelompok mustahik sesuai ketentuan syariah, sementara dana wakaf dapat digunakan untuk aset produktif yang mendukung keberlanjutan organisasi. Penyelarasan ini penting agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan aturan atau batasan dari sumber dana yang diperoleh.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, organisasi Islam perlu menerapkan berbagai strategi agar anggaran dapat digunakan secara optimal. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam sistem administrasi dan pembelajaran. Penerapan sistem keuangan berbasis digital dapat membantu dalam transparansi pencatatan keuangan serta mengurangi pemborosan dalam

operasional. Selain itu, penggunaan e-learning atau bahan ajar digital juga dapat menghemat biaya pengadaan buku dan materi cetak. Tidak hanya itu, pemeliharaan aset dan infrastruktur secara berkala juga menjadi langkah efisien yang perlu diperhatikan. Daripada terus membangun fasilitas baru, organisasi dapat mengalokasikan anggaran untuk perawatan gedung, laboratorium, dan sarana lain agar tetap layak digunakan dalam jangka panjang.

Efektivitas penggunaan dana dalam organisasi Islam juga bergantung pada bagaimana anggaran yang disusun benar-benar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai apakah dana yang digunakan memberikan dampak nyata terhadap pendidikan dan kesejahteraan umat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur keberhasilan program melalui indikator yang jelas, seperti peningkatan jumlah penerima manfaat beasiswa, peningkatan kualitas pendidikan, atau keberlanjutan program dakwah dan sosial. Dengan adanya pengukuran dampak, organisasi dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti dewan pengawas syariah, tenaga pendidik, dan masyarakat, dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan efektivitas karena keputusan keuangan lebih berbasis pada kebutuhan riil dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Diversifikasi sumber pendanaan juga menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan rencana anggaran dengan kondisi keuangan organisasi Islam. Bergantung hanya pada satu sumber dana dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan keuangan, terutama jika terjadi perubahan kebijakan atau penurunan jumlah donasi. Oleh karena itu, organisasi perlu mencari alternatif pendanaan yang lebih berkelanjutan, seperti pengelolaan wakaf produktif, kemitraan dengan lembaga filantropi Islam, atau pengembangan unit usaha berbasis syariah. Dengan memiliki sumber pendanaan yang beragam, organisasi dapat lebih fleksibel dalam mengalokasikan anggaran dan mengurangi ketergantungan terhadap sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak tetap.

Pada akhirnya, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana sangat menentukan keberlanjutan organisasi Islam dalam menjalankan misinya. Penyelarasan rencana anggaran dengan sumber pendanaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek syariah, kebutuhan organisasi, serta dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Dengan perencanaan keuangan yang baik, sistem monitoring yang ketat, serta diversifikasi pendanaan yang tepat, organisasi Islam dapat lebih optimal dalam memberikan manfaat bagi umat dan memastikan keberlanjutannya di masa depan.

Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas

Mekanisme kontrol dan akuntabilitas dalam penyelarasan rencana anggaran dengan sumber pendanaan organisasi pendidikan Islam merupakan aspek penting dalam memastikan transparansi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan dana. Organisasi pendidikan Islam sering kali memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, donasi masyarakat, hibah lembaga filantropi Islam, serta pendapatan dari usaha berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan sistem kontrol yang ketat serta akuntabilitas yang jelas agar dana yang diterima dapat digunakan sesuai dengan peruntukan dan memberikan manfaat optimal bagi umat.

Mekanisme kontrol dalam organisasi pendidikan Islam bertujuan untuk mengawasi penggunaan anggaran agar tetap sesuai dengan rencana yang telah disusun dan tidak terjadi penyimpangan atau pemborosan. Salah satu bentuk kontrol yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, di mana setiap pengeluaran harus dikaitkan dengan pencapaian target tertentu yang telah ditetapkan dalam perencanaan keuangan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam sistem keuangan berbasis digital juga dapat membantu dalam pengawasan, pencatatan transaksi secara real-time, serta analisis keuangan yang lebih transparan dan akurat. Kontrol juga bisa dilakukan melalui audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran dan penerimaan dana telah sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan organisasi.

Di sisi lain, akuntabilitas dalam organisasi pendidikan Islam sangat penting untuk membangun kepercayaan dari para donatur, masyarakat, serta pihak-pihak yang mendukung pendanaan organisasi. Akuntabilitas keuangan dapat diwujudkan melalui laporan keuangan yang transparan dan terstruktur, yang mencakup rincian pemasukan dan pengeluaran dana secara jelas. Laporan ini harus dibuat secara berkala dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti dewan pengawas syariah, yayasan, serta para donatur. Selain itu, organisasi juga dapat menerapkan sistem pelaporan publik, misalnya melalui publikasi laporan tahunan atau pemanfaatan platform digital untuk memberikan update kepada masyarakat tentang bagaimana dana yang terkumpul telah digunakan. (Nurhasanah, 2018, p. 16)

Mekanisme kontrol dan akuntabilitas juga melibatkan adanya pengawasan eksternal seperti audit independen yang dilakukan oleh lembaga profesional atau otoritas keuangan syariah. Audit eksternal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi keuangan organisasi secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengawasan dari dewan pengawas syariah juga menjadi

faktor penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip Islam dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.

Selain aspek keuangan, akuntabilitas juga mencakup pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi. Misalnya, organisasi pendidikan Islam harus dapat menunjukkan bahwa dana yang telah digunakan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, baik melalui penyediaan beasiswa, pengembangan kurikulum berbasis Islam, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, maupun pembangunan infrastruktur pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi program secara berkala untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran serta melakukan perbaikan jika ditemukan kendala dalam implementasi program. (Sukatin & Nasution, 2021, p. 142)

Dengan adanya mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang baik, organisasi pendidikan Islam dapat memastikan bahwa rencana anggaran yang disusun benar-benar selaras dengan sumber pendanaan yang ada serta dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sistem ini juga akan meningkatkan kepercayaan donatur dan pihak eksternal, sehingga organisasi dapat terus berkembang dan memperoleh dukungan keuangan yang berkelanjutan. Transparansi, pengawasan ketat, dan komitmen terhadap prinsip syariah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang amanah, profesional, dan bertanggung jawab.

Rasio Keseimbangan Anggaran

Dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, lembaga pendidikan Islam dapat memastikan bahwa rasio keseimbangan anggaran tetap terjaga. Transparansi membantu dalam pelaporan yang jelas, akuntabilitas memastikan tanggung jawab keuangan, efektivitas menjamin bahwa setiap dana yang digunakan memberikan manfaat optimal, dan efisiensi memungkinkan organisasi memanfaatkan sumber daya dengan cara yang paling hemat dan produktif. (Harbes et al., 2024, p. 135)

Rasio keseimbangan anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan organisasi pendidikan Islam. Konsep ini mengacu pada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dalam anggaran, sehingga organisasi dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa mengalami defisit atau ketergantungan yang berlebihan terhadap satu sumber pendanaan tertentu. Dalam konteks organisasi pendidikan Islam, rasio keseimbangan anggaran harus disesuaikan dengan karakteristik sumber pendanaan yang bersifat variatif, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, serta pendapatan dari unit usaha syariah.

Salah satu aspek utama dalam menjaga keseimbangan anggaran adalah rasio pendapatan dan pengeluaran. Organisasi harus memastikan bahwa pemasukan yang diperoleh mampu menutupi biaya operasional, pengembangan program, dan investasi jangka panjang. Idealnya, rasio antara pendapatan dan pengeluaran harus tetap seimbang atau lebih besar pada sisi pemasukan, sehingga terdapat surplus yang dapat digunakan untuk pengembangan lembaga. Jika terjadi defisit anggaran, organisasi harus segera mengevaluasi sumber masalahnya, apakah karena ketidakseimbangan dalam alokasi dana atau karena adanya sumber pendanaan yang menurun.

Selain itu, rasio ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal juga menjadi faktor penting dalam keseimbangan anggaran. Jika organisasi terlalu bergantung pada donasi atau hibah dari pihak eksternal, maka keberlanjutan finansial bisa menjadi rentan jika terjadi penurunan jumlah donatur atau perubahan kebijakan dari lembaga pemberi dana. Oleh karena itu, organisasi pendidikan Islam perlu mendiversifikasi sumber pendapatan, misalnya dengan mengembangkan wakaf produktif, unit bisnis berbasis syariah, atau investasi dalam aset yang memberikan keuntungan jangka panjang. Dengan adanya sumber pendanaan yang lebih beragam, organisasi dapat lebih fleksibel dalam menyusun anggaran tanpa harus mengalami ketergantungan terhadap satu jenis pemasukan saja.

Rasio keseimbangan anggaran juga dapat dianalisis melalui rasio alokasi dana untuk kebutuhan operasional dan investasi. Dalam organisasi pendidikan Islam, alokasi dana umumnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu biaya operasional rutin (seperti gaji tenaga pendidik, pemeliharaan fasilitas, dan kegiatan akademik), biaya program sosial (seperti beasiswa dan bantuan pendidikan), serta biaya pengembangan atau investasi (seperti pembangunan sarana baru atau pengadaan teknologi pembelajaran). Untuk mencapai keseimbangan anggaran, organisasi perlu memastikan bahwa proporsi pengeluaran untuk masing-masing kategori tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Jika terlalu banyak dana yang dialokasikan untuk operasional tanpa adanya investasi jangka panjang, maka organisasi bisa mengalami stagnasi dalam perkembangan. Sebaliknya, jika terlalu banyak investasi tetapi operasional tidak dikelola dengan baik, maka efektivitas program pendidikan bisa menurun.

Untuk meningkatkan keseimbangan anggaran, organisasi juga perlu melakukan perencanaan keuangan berbasis proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Dengan menyusun proyeksi keuangan yang realistis berdasarkan tren pemasukan dan pengeluaran dari tahun-tahun sebelumnya, organisasi dapat mengidentifikasi potensi risiko defisit serta mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam

pencatatan dan analisis keuangan juga dapat membantu dalam meningkatkan akurasi pengelolaan anggaran dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data.

Pada akhirnya, rasio keseimbangan anggaran dalam penyelarasan rencana anggaran dengan sumber pendanaan organisasi pendidikan Islam harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dengan memastikan bahwa pendapatan cukup untuk menutupi pengeluaran, mendiversifikasi sumber dana, serta mengalokasikan anggaran secara proporsional antara operasional dan investasi, organisasi dapat menjalankan misinya secara efektif dan berkelanjutan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan juga menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan para donatur dan masyarakat, sehingga organisasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat.

Untuk mengetahui persentase keseimbangan antara rencana biaya dengan sumber pendanaan pada organisasi Pendidikan Islam dapat diketahui melalui rumus berikut:

$$\text{Rasio Pendapatan} = \left(\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Pengeluaran}} \right) \times 100\%$$

Apabila hasilnya mencapai atau melebihi 100%, maka pendapatan organisasi dianggap mencukupi atau bahkan mengalami surplus. Sebaliknya, jika kurang dari 100%, maka terjadi defisit anggaran yang harus segera diatasi.

Sebagai contoh, sebuah organisasi pendidikan Islam mengelola sekolah dengan total pendapatan tahunan sebesar Rp1.000.000.000 yang berasal dari berbagai sumber, seperti dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan hasil usaha berbasis syariah. Sementara itu, total pengeluaran untuk operasional sekolah, seperti gaji tenaga pendidik, biaya pemeliharaan fasilitas, program pendidikan, serta bantuan beasiswa, mencapai Rp900.000.000 per tahun.

Untuk mengetahui keseimbangan anggaran, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pendapatan} &= \left(\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Pengeluaran}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{1.000.000.000}{900.000.000} \right) \times 100\% \\ &= 111\% \end{aligned}$$

Karena hasilnya lebih dari 100%, maka organisasi memiliki surplus sebesar Rp100.000.000 yang dapat digunakan untuk pengembangan sekolah, seperti pembelian buku, pengadaan laboratorium komputer, atau program pelatihan guru.

Namun, jika kondisi berbalik, misalnya pendapatan hanya Rp800.000.000, sedangkan pengeluaran tetap Rp900.000.000, maka:

$$\text{Rasio Pendapatan} = \left(\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Pengeluaran}} \right) \times 100\%$$

$$= \left(\frac{800.000.000}{900.000.000} \right) \times 100\% \\ = 88,9\%$$

Hasil ini menunjukkan defisit sebesar Rp100.000.000 yang berarti organisasi perlu mencari solusi untuk menyeimbangkan anggaran. Langkah yang bisa dilakukan antara lain adalah mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, mencari tambahan donasi, mengoptimalkan aset wakaf produktif, atau meningkatkan pendapatan dari unit usaha berbasis syariah.

Dengan menerapkan analisis rasio keseimbangan anggaran secara rutin, organisasi pendidikan Islam dapat lebih efektif dalam mengelola keuangan dan memastikan keberlanjutan program pendidikannya tanpa mengalami risiko keuangan yang besar.

5. KESIMPULAN

Penyelarasan rencana anggaran dengan sumber pendanaan dalam organisasi pendidikan Islam merupakan faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan yang baik harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Organisasi pendidikan Islam sering kali memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, serta hasil usaha berbasis syariah. Oleh karena itu, strategi penyelarasan anggaran dengan sumber pendanaan yang ada harus dilakukan secara sistematis agar tidak terjadi defisit atau pemborosan yang dapat menghambat operasional pendidikan. Dalam manajemen keuangan organisasi pendidikan Islam, rasio keseimbangan anggaran menjadi indikator utama dalam menilai apakah pendapatan yang diperoleh mampu menutupi seluruh kebutuhan biaya. Jika rasio pendapatan terhadap pengeluaran mencapai atau melebihi 100%, berarti organisasi memiliki anggaran yang cukup atau mengalami surplus yang dapat dialokasikan untuk pengembangan institusi. Namun, jika rasio ini berada di bawah 100%, maka terjadi defisit yang harus segera diatasi dengan langkah-langkah seperti efisiensi biaya, diversifikasi sumber pendanaan, atau pengoptimalan aset produktif berbasis wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, U. (2018). Kebijakan publik dalam anggaran pendidikan. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 2(1), 17–37. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37>
- Arifudin, Moh., Sholeha, F. Z., & Umami, L. F. (2021). Planning (perencanaan) dalam manajemen pendidikan Islam. *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.21154/maalim.v2i2.3720>
- Harbes, B., Karim, H. A., Sesmiarni, Z., & Armedo, M. (2024). Perencanaan pendidikan dan manajemen pembiayaan (mewujudkan peningkatan mutu secara berkelanjutan). *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2).
- Kartika, D., Mujahidin, E., Indra, H., Indupurnahayu, I., & Andriana, N. (2023). Perencanaan keuangan lembaga pendidikan Islam. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 134–155. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v7i1.35887>
- Muhtar, M. A., Bk, T., & Akil, H. (2021). Perencanaan keuangan sekolah dan upaya perbaikan sistem manajemen keuangan di RA-Abata Mardhotillah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3).
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhakim, H. Q. A. (2023). Manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 22(2), 303–313.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Akuntabilitas*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Rahmatullah, R. (2021). Model perencanaan strategis pembiayaan pendidikan berbasis keadilan sosial. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 5(2), 75–85.
- Rofiq, A., & Ramli, M. (2023). Peran manajer sekolah dalam optimalisasi pembiayaan pendidikan berbasis BOS. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Pendidikan*, 9(2), 189–200.
- Sagala, S. (2020). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukatin, S., & Nasution, F. (2021). Pengukuran kinerja dan akuntabilitas pendidikan. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v2i2.2592>
- Sutarto, A. (2019). Evaluasi anggaran pendidikan di tingkat sekolah menengah: Studi kasus di kota Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 112–126.
- Tanjung, H., & Wahyuni, S. (2022). Transparansi anggaran pendidikan dan pengaruhnya terhadap mutu pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(1), 55–65.
- Widodo, J., & Fitria, Y. (2020). Efektivitas pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 13(3), 140–149.